

SERTIFIKAT

Penguatan Peran Pendidikan
dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2015

Diberikan kepada:

Dr. MUKODI, M.S.I.

atas partisipasinya sebagai

NARASUMBER

dengan judul

"REPOSISI ILMU PENDIDIKAN: Sebuah Tinjauan Reflektif"

dalam acara Seminar Nasional Pendidikan Tahun 2015
yang diselenggarakan oleh LPPM STKIP PGRI Pacitan pada tanggal 29 Desember 2015



Mengetahui,
Ketua STKIP PGRI Pacitan

Dr. H. Maryono, M.M.

NIDN. 0719035601



Pacitan, 29 Desember 2015
Kepala LPPM STKIP PGRI Pacitan

Dr. Mukodi, M.S.I.

NIDN. 0726077704



Ketua
R. TRIYANTI, M.Pd.
NIDN. 0722066401

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

STKIP PGRI PACITAN 2015

**"Penguatan Peran Pendidikan
dalam Mengadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"**

Pacitan, 29 Desember 2015

Penyelenggara:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STKIP PGRI Pacitan**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2015

"Penguatan Peran Pendidikan

dalam Mengadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"

29 Desember 2015

Cetakan ke – 1

Terbitan Tahun 2015

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Seminar Nasional (2015 Desember 29: Pacitan)

Penyunting: Mukodi [et.al] – Pacitan: LPPM

STKIP PGRI Pacitan, 2015

ISBN: 978-602-73898-0-9

Diselenggarakan oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STKIP PGRI Pacitan**

Diterbitkan oleh:

LPPM Press STKIP PGRI Pacitan

Jalan Cut Nyak Dien No 4A Ploso Pacitan

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STKIP PGRI Pacitan, 2015**

**Penyuntingan semua tulisan dalam prosiding ini dilakukan
oleh Tim Penyunting Seminar Nasional Pendidikan Tahun 2015
dari LPPM STKIP PGRI Pacitan**

Prosiding dapat diakses: <http://lppm.stkippacitan.ac.id>

REPOSISI ILMU PENDIDIKAN: Sebuah Tinjauan Reflektif

Mukodi

STKIP PGRI Pacitan
e-mail: mukodi@yahoo.com

PROLOG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berjalan sangat cepat, dan masif. Hampir disetiap waktu ditemukan perkembangan baru, dan rekayasa IPTEK terbarukan. Reproduksi pemutakhiran IPTEK pun lainnya deret ukur (Barisan Geometri). Futuris Alvin Toffler di dalam bukunya yang klasik *The Third Wave* menyebut abad ini sebagai abad gelombang peradaban informasi (1970-sekarang).

Konsumen (manusia penikmat) pun harus cerdas memanfaatkannya, sekaligus waspada. Kecerdasan dan kewaspadaan konsumen harus *momot* pertimbangan *insani* berupa *mafsadat* (kemanfaatan) dan *mundorot* (kerusakan) atas segala hal yang timbul darinya. Lebih-lebih, produsen IPTEK—ilmuwan, penggagas ide, seniman, desainer, dll—demikian pula adanya. Mereka harus menempatkan norma-norma (norma agama, hukum, kesusilaan, adat istiadat) dan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai alat kontrol. Kealfaannya menggunakan alat kontrol tersebut berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Persoalannya, kemudian sejauhmana manusia (produsen dan konsumen) dapat bijak, baik dalam merekayasa, mengembangkan, maupun mempergunakan IPTEK? Lantas apa yang perlu dipersiapkan? Jawaban atas hal itu, tentunya tidak mudah. Namun demikian, sebagai manusia tentu harus berihhtiar agar perkembangan IPTEK dapat bermanfaat bagi manusia. Pendidikan disinyalir dapat berperan serta meminimalisir dampak negatif IPTEK.

MENGHIDUPKAN KEMBALI ILMU PENDIDIKAN KITA

Era abad XXI adalah era ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa *suport* ilmu pengetahuan dan teknologi suatu masyarakat akan tertinggal dari perubahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi direproduksi, dan diproduksi oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang berkualitas

berpangkal pada ilmu pendidikan yang berkualitas pula. Tanpa adanya ilmu pendidikan yang berkualitas, 'tidak mungkin' teretas lembaga pendidikan yang berkualitas.

Sayangnya, di Indonesia hal itu sulit terjadi. Bahkan, Muhtar Bukhori dan H.R. Tilaar mengatakan ilmu pendidikan telah mati. *Mafhum al-Muwâfaqah*-nya, mana mungkin ada lembaga pendidikan yang berbobot, jika ilmu pendidikan saja telah mati suri?

Ibaratnya, ilmu pendidikan laiknya pondasi bangunan sebuah rumah. Ia, terdiri dari material besi, baja, koral, dan semen. Dinding, tembok, atap, cat, serta isian rumahnya merupakan pendidikan (formal, non formal, informal) itu sendiri. *Mafhum al-Mukhallafah*-nya, jika pondasi sebuah rumah itu rapuh, alias keropos, niscaya rumah itu akan mudah roboh. Begitu pula dengan nasib pendidikan di Indonesia, ia hidup, dan berkembang tanpa landasan pondasi yang kokoh. Ironisnya, pondasinya (ide, gagasan, dan konsep) dipinjam (*borrowing*) dari negara-negara Barat. Padahal, adat-istiadat, noma dan budaya Indonesia berbeda dengan bangsa Barat.

Tak ayal lagi, banyak konsep pendidikan yang dicangkokkan di Indonesia kurang cocok, bahkan tidak cocok penerapannya. Sebut saja, konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13) tidak berjalan dengan baik. Tragisnya, peserta didik Indonesia seolah telah tercerabut dari habitat kebudayaannya.

Indikasinya sederhana, Indonesia adalah negara agraris dan kepulauan, akan tetapi beras, jagung, kedelai harus impor. Pasokan ikan segar juga sangat terbatas. Lebih dari itu, anak-anak Indonesia di usia Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak mempunyai keterampilan yang memadai di bidang pertanian, atau pun kelautan (pelayaran).

Praktis, sulit ditemukan lagi, para petani muda produktif, atau nelayan muda yang terampil. Bahkan dalam 'alam mimpi' pun anak-anak kita tidak ada lagi yang mau menjadi petani, ataupun nelayan. Paradoksal memang realitas kehidupan di Indonesia, tatkala SDA (Sumber Daya Alam) tersedia, namun SDM-nya (Sumber Daya Manusia) bermalas-malasan.

Pendidikan (formal, non formal, informal) harus didorong menjadi agen perubahan. Perubahan pola pikir SDM yang 'berpangku tangan' atas SDA-nya menuju SDM yang produktif, momot tanggung jawab. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berpangkal pada kebudayaan keindonesiaan (kebudayaan nasional).

Salah satu solusi untuk mendorong terwujudnya pendidikan menuju agen perubahan adalah menghidupkan lagi ilmu pendidikan. Artinya, mendudukan ilmu pendidikan sebagai pondasi dasar pendidikan. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan praktis. Dengan kata lain, ilmu pendidikan adalah alat pendidikan itu sendiri.

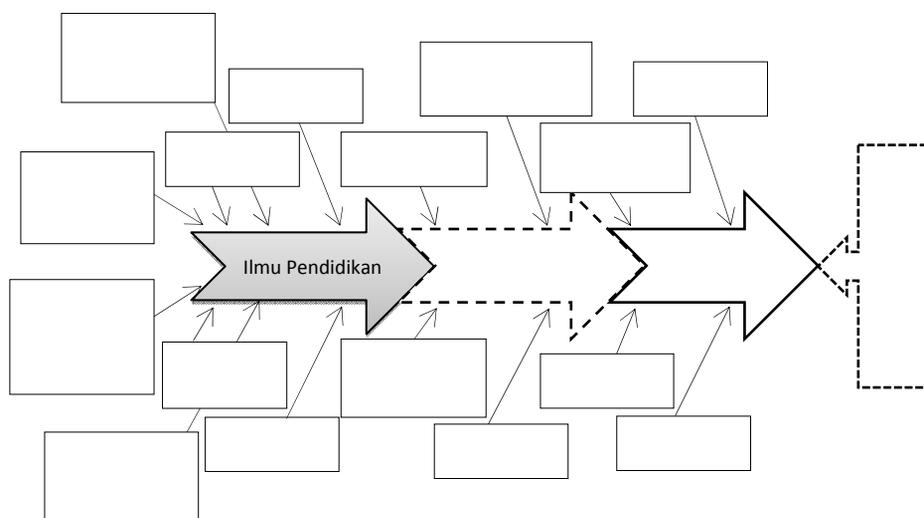
Dengan begitu, ilmu pendidikan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan. Keduanya saling membutuhkan, satu sama lainnya. Tanpa adanya ilmu pendidikan yang baik, sulit diretas pendidikan yang baik. Agar menghasilkan ilmu pendidikan dan pendidikan yang berkualitas diperlukan kerja keras, dan upaya penghidupan kembali ilmu pendidikan itu sendiri.

Posisi ilmu pendidikan pada hakikatnya merupakan pondasi, atau *soko guru* pendidikan. Objek material ilmu pendidikan berupa segala sesuatu yang berasal dari dalam, dan dari luar ilmu pendidikan. Sifat objek materialnya pun tentatif, dan adaptif dengan perubahan.

Adapun objek material ilmu pendidikan, diantaranya: 1) kebijakan trans nasional dan internasional, serta isu-isu kekinian; 2) Lembaga Pendidikan Tinggi dan Kependidikan (LPTK) bidang ilmu pendidikan; 3) wujud dunia persekolahan; 4) perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS); 5) tuntutan dunia global--dunia industri, ekonomi, pariwisata, keamanan, kependudukan, perubahan iklim, dan lain-sejenisnya--; 6) pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) lokal; 7) dan pengembangan spasial kewilayahan, kebijakan pendidikan nasional, adat-istiadat (budaya lokal).

Kemudian, reproduksi pelbagai konsep, ide, dan gagasan ilmu pendidikan menjadi bahan *prototype* lembaga pendidikan. Baik yang berupa pendidikan formal, berbentuk dunia persekolahan (PAUD, TK, SD/ MI/ SMP/ MTs/ SMA/ MA/ PTN/ PTS), pendidikan non formal (lembaga kursus, bimbingan belajar, kependuan), maupun pendidikan informal (pendidikan keluarga: anak, orang tua, kakek-nenek).

Laiknya, ilmu pendidikan yang mempunyai objek material, lembaga pendidikan pun demikian adanya. Objek materialnya, diantaranya: 1) tuntutan wali murid dan *staksholder*; 2) *input* studi komparatif dunia persekolahan; 3) tuntutan kehidupan (dunia kerja dan industri); 4) perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS). Selanjutnya, luaran (*output*) dari lembaga pendidikan kembali lagi ke masyarakat, dan mendapatkan pelbagai masukan dari masyarakat. Adapun salah satu tawaran alternatif konsep reposisi ilmu pendidikan dapat dilihat pada bagan I sebagaimana berikut ini:



Bagan I.

Konsep Reposisi Ilmu Pendidikan

Bagan I tersebut di atas, menggambarkan bahwa posisi ilmu pendidikan, lembaga pendidikan, dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan lainnya. Poin terpenting yang harus dipahami adalah ilmu pendidikan, lembaga pendidikan (formal, non formal, dan informal), dan masyarakat harus berbasis pada kearifan budaya lokal keindonesiaan, dan berorientasi pada kelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, semestinya konsep pendidikan di Indonesia harus berdasar nilai-nilai kearifan budaya, dan menggali, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam sekitar.

MENJAGA KEASLIAN PENDIDIKAN INDONESIA DITENGAH GEMPURAN INDUSTRIALISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL

Kata industri, biasanya digambarkan dan dikaitkan dengan kegiatan manufaktur atau pabrik dan rekayasa barang mentah menjadi barang jadi dan seterusnya. Kegiatan industri adalah pengejawantahan dari satu konsep ekonomi liberal yang berasal dari (negara-negara) Barat. Salah satu faktor utama dalam sistem ini adalah permodalan atau modal uang (kapital) yang menjadikan sistem ekonomi Barat memiliki ciri khas sehingga sering disebut juga sebagai ekonomi kapitalistik. Proses kegiatan industri dan bisnis dalam sistem ekonomi kapitalistik ini bersifat efisien, efektif produktif dan berorientasi profit. Singkatnya, kegiatan bisnis dan industri diarahkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Tak ayal, kesuksesan dunia industri kemudian diikuti oleh sektor-sektor lain, tak kecuali dunia pendidikan. Imbasnya, lembaga pendidikan—didunia pesekolahan—ikut-ikutan mengadopsi aturan main dunia industri. Salah satunya adalah tentang sistem manajemen mutu ISO (*International Organization for Standardization*) 9001:2008. Padahal, peruntukan ISO pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin kualitas produksi barang (benda mati). Bukan, untuk menstandarkan manusia (makhluk hidup).

Ditilik secara historis, pada tahun 1959, Amerika Serikat mengembangkan *Quality Program Requirements*, Sebuah standar kualitas untuk kegiatan Militer yang menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan supplier. Pada tahun 1962, NASA juga mengembangkan *Quality System Requirements* untuk supplier yang serupa. 1968, NATO mengadopsi AQAP (*Allied Quality Assurance Procedures*) spesifikasi untuk kebutuhan peralatan NATO.

Selanjutnya ide penjaminan mutu mulai menyebar di kalangan militer. Bahkan, merangsek masuk ke bilik-bilik dunia industri dan dunia pendidikan. Lebih dari itu, kini ISO seolah menemukan momentumnya. Negara-negara berkembang berlomba-lomba mendapatkan sertifikat ISO. Dalilnya, tentu demi kualitas dan martabat. Siapa yang diuntungkan?

Pengadopsian ISO ke dunia pendidikan di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia adalah suatu kelaziman. Hal ini merupakan bentuk ihktiar lembaga pendidikan agar kualitasnya dapat lebih baik, dan terstandardkan. Hanya saja, para pemangku kebijakan di lembaga pendidikan harus paham bahwa tujuan lembaga pendidikan tidak sama dengan dunia industri, apalagi militer. Ketiganya berbeda tujuan dan prinsip. Jika, lembaga pendidikan bertujuan untuk terwujudnya pendewasaan peserta didik, dan menggali serta mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaannya pun diatur secara beragam, tergantung potensi dan kearifan lokal masing-masing kewilayahan. Belajar yang menyenangkan (*enjoyful learning*) dan kekeluargaan (*kinship*) adalah prinsipnya. Berbeda dengan dunia industri yang bertujuan pada kuantitas (hasil) produk yang terstandarkan, dan berkualitas tinggi. Perpegang pada prinsip efisien efektif, dan mengikuti ritme standar operasional prosedur yang kaku.

Di sisi yang sama, militer pun demikian adanya. Ia berbeda dengan dunia industri dan lembaga pendidikan. Tujuan akhir dari eksistensinya adalah untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut dan udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum

nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Prinsipnya adalah kendali terpusat, disiplin, bela Negara, dan otoritatif.

Poin terpenting yang harus dipahami adalah jika lembaga pendidikan tetap mengadopsi ISO sebagai salah satu alat kontrol penjaminan mutu tentunya ada yang hilang darinya. Yang hilang adalah nilai-nilai pendidikan itu sendiri, meliputi: 1) etika dan moralitas; 2) kejujuran dan keterbukaan; 3) kesahajaan dan kepedulian; 4) kekeluargaan dan gotong royong; 5) tanggung jawab dan kedisiplinan; 6) kebesaran jiwa dan keluhuran budi.

Nilai-nilai pendidikan tersebut, akan menguap, kemudian hilang jika ISO dicangkokkan di lembaga pendidikan. Mengapa demikian? Sebab ISO berorientasi pada keterukuran yang bersifat mekanik, kaku dan rigid. Berkebalikan dengan lembaga pendidikan yang bersifat luwes, adaptif dan toleran (mendidik, membimbing, sekaligus mengarahkan). Selain itu, nilai-nilai pendidikan ditumbuhkembangkan melalui dialektika dan keadaban.

Lantas apa solusinya, jika ISO kurang—kalau tidak dikatakan tidak—cocok diterapkan di dunia pendidikan. Tawarannya adalah kualitas LPTK ditingkatkan, dan guru di dunia persekolahan harus distandardkan. Perbaikan kualitas LPTK dilakukan dengan cara seleksi masuk calon di LPTK harusnya diperketat, dan lebih ditingkatkan gradnya. Hanya calon mahasiswa yang memenuhi standar, dan persyaratan sebagai mahasiswa di LPTK saja yang diterima. Mereka yang tidak memenuhi syarat dipersilahkan memilih jurusan non keguruan. Alih kata, calon guru harus kredibel, dan akuntabel.

Kemudian, kualifikasi rekrutmen guru di dunia persekolahan pun harus diperketat, dan distandardkan. Praktis, nantinya tidak semua lulusan LPTK otomatis menjadi guru. Mereka harus diuji terlebih dahulu dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Akses mendapatkan kartu NUPTK pun harus ketat. Mekanismenya bisa mengadopsi persyaratan perolehan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Yakni, dengan test potensi akademik (TPA) dan *toefl*. Bagi para guru yang belum lolos NUPTK tidak diperkenankan mengajar. Namun, bisa saja mereka ditugaskan menjadi tenaga kependidikan (administratif).

Dalam konteks itu, diperlukan suatu kebijakan dibidang pendidikan dan politik pendidikan yang baik. Salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membatasi penerimaan calon mahasiswa baru di LPTK negeri. Tujuannya, agar LPTK swasta bisa hidup, sekaligus lebih longgar menyaring calon mahasiswa baru. Namun demikian, LPTK swasta juga harus dibatasi daya tampungnya. Agar kualitas *out-put* (luarannya) terkontrol, terjaga dan terstandardkan. Suatu misal, jika pemerintah membatasi penerimaan mahasiswa di LPTK negeri dengan 2 kelas, maka LPTK swasta dibatasi 1 kelas, demikian seterusnya.

Di sisi yang bersamaan, nilai-nilai keaslian pendidikan ala Indonesia harus ditonjolkan dalam kurikulum di dunia persekolahan. Harus diakui, sekarang ini kurikulum pendidikan sudah ada muatan lokal (Mulok), tetapi kualitas pembelajarannya tidak fokus. Bahkan, tidak jarang Mulok hanya dijadikan pelengkap penderita. *Alhasil*, bobot kualitas pembelajaran dan jam pembelajaran sangat terbatas. Padahal, semestinya Mulok mewadai nilai-nilai kearifan local keindonesiaan yang ada lokalitas masyarakat. Dengan demikian, diperlukan 'racikan yang pas' agar nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertahankan, dan dikembangkan.

Lebih-lebih, nilai-nilai keaslian keindonesiaan menjadi daya tangkal dari gempuran globalisasi di sektor pendidikan. Lebih dari itu, di era realisasi kebijakan MEA yang akan diberlakukan dipenghujung tahun 2015. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan di Indonesia harus bertumpu pada nilai-nilai keindonesiaan, tidak lagi meminjam (*borrowing*) dari Negara Barat. Muaranya, *output* (luaran) yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Bagaimana ISO di bidang pendidikan itu? Jika, terpaksa mengikuti kepentingan, dan kebutuhan dunia global terkait persyaratan ISO, Indonesia—Kemendikbud, dan Kemenag—perlu tawar-menawar kelayakan ISO itu sendiri. Jika, terpaksa harus mengikuti ISO, nilai-nilai pendidikan harus dijadikan landasan pelaksanaannya.

EPILOG

Ilmu pendidikan hendaknya menjadi batu pijakan dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan, tak terkecuali arah lembaga pendidikan (pendidikan formal, non formal, informal) di masa depan. Dengan kata lain, arah dan proses pendidikan tidak boleh dilepaskan, atau sengaja melepaskan diri dari ilmu pendidikan.

Keaslian (indigiusitas) pendidikan ala Indonesia harus tetap dijaga, dikembangkan dan ditawarkan dalam percaturan global. Oleh karena itu, ilmu pendidikan khas keindonesiaan harus menaungi arah dan kebijakan pendidikan. Kegiatan pencangkotan (*borrowing*) di sektor pendidikan ke Negara Barat harus dihentikan, sudah saatnya Indonesia mandiri.

DAFTAR BACAAN

- Bernadib, Sutari Imam. 1982. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/16583/Beras-Import-Masuk-November/2015/10/27>.
- <http://finance.detik.com/read/2015/09/25/081030/3027747/4/ri-import-jagung-23-juta-ton-melonjak-23>.
- <http://ketapang.deliserdangkab.go.id/2015/09/25/indonesia-masih-import-kedelai.html>.
- <http://old.uinmalang.ac.id/index>.
- <http://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/sejarah-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/>.
- Muliawan, Jasa Unggah. 2008. *Epistemologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peursen, C.A. Van. 1985. *Susunan Ilmu Pengetahuan*, terj. K. Bertens & A.A. Nugroho. Jakarta: PT. Gramedia.
- Undang-undang No.34 tahun 2004.
- Zuchdi, Darmiyati. 2008. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.